

Judul : Reformasi subsidi energi ditunda
Tanggal : Jumat, 10 Juli 2020
Surat Kabar : Republika
Halaman : 6

Reformasi Subsidi Energi Ditunda

Pemerintah akan tetap menyusun formula skema subsidi yang tepat sasaran.

■ ADINDA PRYANKA

JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mereformasi subsidi energi berbasis penerima pada tahun depan harus kembali ditunda. Badan Anggaran (Banggar) DPR memutuskan skema subsidi tahun depan masih berbasis komoditas karena harus melakukan perbaikan data dan dengan alasan mengurangi potensi kekisruhan.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, akurasi data penerima subsidi masih menjadi tantangan terbesar dalam penyaluran subsidi berbasis orang. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk memperbaiki data terlebih dahulu untuk menghindari persoalan.

"Kami berpendapat, semua, bahwa untuk 2021, pemerintah tetap memberikan subsidi solar, LPG tiga kilogram, dan listrik ke masyarakat dan kelompok rentan miskin. Untuk minyak tanah, LPG, solar, masih berbasis produk untuk mengurangi kegaduhan politik," tuturnya dalam rapat kerja dengan pemerintah, Kamis (9/7).

Said menekankan, tidak ada niat

dari pemerintah maupun DPR untuk mencabut subsidi. Berdasarkan rapat panitia kerja dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) beberapa waktu lalu, subsidi tetap disalurkan dengan transformasi mekanisme. Terkhusus, mekanisme penyaluran subsidi LPG diubah menjadi bantuan nontunai dengan skema berbasis orang.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan kementerian teknis terkait, termasuk dalam sidang kabinet, khususnya mengenai pembaruan data penerima subsidi. Dengan demikian, subsidi dapat berdampak langsung kepada masyarakat dan perekonomian domestik.

Meski reformasi subsidi dibatalkan, Sri memastikan pemerintah akan tetap menyusun formula skema subsidi yang tepat sasaran. Kebijakan akan dilakukan secara bertahap agar masyarakat tidak mengalami guncangan. "Kita bisa menuju kepada subsidi yang targetnya langsung ke masyarakat. Kita akan formulasi masukan ini," ucapnya.

Sri mengakui tidak mudah mereformasi subsidi energi dari sebelum-

Berbeda jika bantuannya berbasis orang, akan langsung ke orang miskin dan rentan, sehingga lebih tepat sasaran.

nya berbasis komoditas ke orang. Pasalnya, dimensi untuk memberikan subsidi terlalu luas, sementara Indonesia sudah terbiasa dengan memberikan subsidi melalui produk atau komoditas. Namun, transformasi harus tetap dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan sosial.

Tahun depan pemerintah menargetkan perubahan skema pemberian subsidi energi menjadi basis orang atau diberikan secara langsung ke kelompok sasaran. Subsidi energi juga akan diintegrasikan ke Program Kartu Sembako. Rencana ini telah

tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Ubaidi Soheh Hamidi, mengatakan, subsidi berbasis komoditas masih kurang tepat sasaran. Pasalnya, masyarakat kelompok menengah ke atas masih dapat mengaksesnya.

"Berbeda jika bantuannya berbasis orang, akan langsung ke orang miskin dan rentan, sehingga lebih tepat sasaran," kata Ubaidi.

Ubaidi menjelaskan, kelemahan dari subsidi berbasis komoditas adalah komoditas yang harganya lebih murah dapat dibeli semua orang dengan harga sama dengan yang dibeli orang miskin. Tidak terkecuali orang kaya yang sebenarnya mampu untuk membeli komoditas energi nonsubsidi.

Sementara itu, untuk basis orang, pemerintah akan memberikan bantuan atau selisih harga tersebut langsung kepada orang miskin dan rentan dalam bentuk nontunai. Bantuan tersebut direncanakan dimasukkan ke Kartu Sembako yang kini sudah berjalan. "Nantinya bantuan bisa dipakai untuk membeli komoditas yang semula bersubsidi," tutur Ubaidi.

■ ed: ahmad fikri noor